

Implementasi Kebijakan *Surabaya Cross Culture International* sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata di Kota Surabaya

¹Dzakiyah Adalatul Hikmah, ²Khusnul Prasetyo, ³Eka Arum Pramestya

¹Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

(email: dzakiyahadalah@gmail.com)

²Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

³Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Every government, regardless of size, must constantly adapt to a changing environment and direct a change in a positive direction in which development is a key to do so. The tourism industry is one of the few development fields that has consistently excelled. The purpose of the Surabaya City Tourism and Culture Office, which bears the nickname "City of Heroes", is to increase tourist attraction through artistic and cultural performances. In 2018, the Ministry of Tourism designated Surabaya as the winner of the "Best City" in Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards. The city government has made several initiatives to promote tourism. The Surabaya City Government carried out preventive efforts in the form of the 2019 annual Surabaya Cross-Cultural International Themed Folk Art Festival. The focus of this research is to explain the implementation of Surabaya Cross Culture International activities and to describe the collaboration between government actors (government, civil society, and the private sector). This research is a descriptive qualitative research with interviews and literature review as the data collection techniques. The resource persons in the study were the Cultural Affairs Staff of the Surabaya City Culture and Tourism Office, the Head of Surabaya Local Parliament for the 2014–2019 period, and the Ning Representative for the City of Surabaya in 2019. The results of this study showed success eventhought there were several technical constraints in implementing the policy indicators proposed by Van Meter and Van Horn, namely the objectives and standards of the policy, the implementers' attitude, resources, the implementers' characteristics and communication between organizations and the economic, social, and political environment. In addition, the collaboration carried out by the government, the private sector, and the community shows synergy to support the successful implementation of Surabaya Cross Culture International.

Keyword:

policy implementation; Surabaya Cross Culture; collaboration

Abstrak

Setiap pemerintah, terlepas dari ukurannya, harus terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan mengarahkan perubahan ke arah yang positif, dan pembangunan adalah kunci untuk melakukannya. Industri pariwisata adalah salah satu dari sedikit bidang pembangunan yang secara konsisten unggul. Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya yang menyandang julukan sebagai “Kota Pahlawan” adalah untuk meningkatkan daya tarik wisata melalui pertunjukan seni dan budaya. Pada tahun 2018, Kementerian Pariwisata menetapkan Surabaya sebagai pemenang kategori “Kota Terbaik” *Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards*. Pemerintah kota telah membuat sejumlah inisiatif untuk mempromosikan pariwisata. Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya preventif berupa Festival Seni Rakyat Bertema Internasional Lintas Budaya Surabaya tahunan 2019. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan analisis implementasi kegiatan *Surabaya Cross Culture International* dan mendeskripsikan bentuk kolaborasi *actor governance (government, civil society, and private sector)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan *literature review*. Narasumber dalam penelitian yaitu Staff Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya Periode 2014–2019, dan Perwakilan Ning Kota Surabaya tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan meskipun terdapat beberapa kendala teknis dalam pengimplementasian kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu tujuan dan standar kebijakan, sikap pelaksana, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana dan komunikasi antar organisasi serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat menunjukkan sinergitas untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan *Surabaya Cross Culture International*.

Kata Kunci:

implementasi kebijakan; *Surabaya Cross Culture*; kolaborasi

Pendahuluan

Pembangunan adalah kekuatan pendorong di balik perubahan progresif yang dilakukan oleh semua pemerintah kota. Potensi suatu daerah dapat dikembangkan dengan menggali dan mengembangkannya. Terlepas dari ukurannya, setiap pemerintah daerah memiliki banyak ruang untuk tumbuh dan meningkatkan infrastrukturnya, sehingga dapat bersaing dengan tujuan wisata lainnya. Industri pariwisata merupakan salah satu bidang yang selalu menjanjikan pertumbuhan yang besar. Menurut Singgalen et al. (2017) industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan institusi terkait pariwisata merupakan empat pilar pembangunan pariwisata. Pengembangan pariwisata berkelanjutan bukan hanya tentang membuat orang mengubah pandangan dunia mereka. Namun, yang lebih penting adalah implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan yang efisien (Guo et al., 2019). Seperti halnya Presiden Joko Widodo yang menjadikan sektor perjalanan dan pariwisata sebagai motor penggerak ekspansi ekonomi di Indonesia. Bisnis dari semua ukuran (dari mikro hingga besar) dan di berbagai sektor telah mendapat manfaat dari kegiatan yang terkait dengan pariwisata, dari yang datang sebelum dan sesudah kegiatan pariwisata itu sendiri hingga yang mendukungnya (Sunaryo, 2013).

Untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang, entitas publik dan

swasta harus bekerja sama. Hubungan kerja yang erat antara industri pariwisata dengan instansi pemerintah lainnya, terutama yang berkaitan dengan konservasi, energi, pertanian, transportasi, kesehatan, keuangan, keamanan, dan administrasi lokal, sangat penting (Mbaiwa et al., 2018). Menurut Juliawati (2012), pertukaran budaya antara tuan rumah dan budaya yang berkunjung serta budaya pencari kerja dari kedua kelompok merupakan aspek sentral dari industri pariwisata. Dari perspektif ini, jelas bahwa pertemuan lintas budaya baik untuk negara dan industri pariwisata. Semua daerah harus menggali dan mengembangkan potensi wisatanya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mampu memanfaatkan berbagai peluang, termasuk namun tidak terbatas pada wisata religi (yang memberikan kesempatan untuk mengikuti upacara keagamaan), wisata olahraga (yang memungkinkan pengunjung untuk menyaksikan pertandingan olimpiade), dan wisata budaya serta pariwisata (yang memungkinkan mereka untuk belajar tentang sejarah dan tradisi daerah).

Menurut (Mbaiwa et al., 2018), tur, pertunjukan senior dan budaya, perjalanan festival, dan kunjungan ke tempat-tempat penting bersejarah semuanya termasuk dalam payung istilah "pariwisata budaya", yang juga mencakup perjalanan ke negara lain untuk tujuan belajar tentang sejarah dan tradisi mereka. Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat Kosnan et al. (2013) yang menyebut jika suatu negara ingin melihat industri pariwisatanya berkembang, maka negara tersebut perlu banyak berinvestasi dalam produk-produk terkait pariwisata seperti penginapan, kuliner/makanan, transportasi, komunikasi, utilitas, dan infrastruktur seperti jalan dan bandara.

Sementara keberadaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah untuk menarik lebih banyak wisatawan ke kota Surabaya sehingga kota ini dapat menghayati julukan uniknya sebagai "Kota Pahlawan". Meskipun kota Surabaya sangat bergantung pada industri ritel, perhotelan, dan transportasi, namun sejatinya Kota Pahlawan juga memiliki kiprah yang kuat dalam kancah pengembangan sektor pariwisata. Keputusan Kementerian Pariwisata untuk menetapkan Surabaya sebagai pemenang kategori "Kota Terbaik" pada Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards tahun ini adalah buktinya. Pemerintah kota telah membuat sejumlah inisiatif untuk meningkatkan industri pariwisata. Upaya pencegahan Kota Surabaya antara lain festival seni lintas budaya internasional tahunan bertepatan *Folk Art Festival 2019*. Pemerintah Kota Surabaya telah menyelenggarakan festival lintas budaya internasional pertama yang pernah ada di Surabaya. Selama lima belas tahun berturut-turut, festival ini telah mempertemukan ribuan orang. Penelitian ini dilakukan sebelum pandemi COVID-19 yang dilakukan dari tahun 2018-2019. Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara sebelum pandemi COVID-19 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.
Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di Kota Surabaya

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
2013	350.017	11.122.194	11.472.211
2014	742.084	15.929.745	16.671.829
2015	853.790	18.019.629	18.873.419

2016	772.058	20.580.728	21.352.786
2017	1.569.130	22.713.892	24.283.022
2018	1.728.194	27.575.125	29.303.319

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (2019)

Angka-angka dalam tabel menunjukkan adanya peningkatan yang jelas dalam pariwisata selama beberapa tahun. Semakin populernya kota Surabaya sebagai tujuan wisata merupakan bukti bahwa perayaan tersebut diapresiasi oleh penduduk setempat dan menjadi barometer keberhasilan festival tersebut. Selain itu, eksistensi Kota Surabaya sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta dan kental dengan sejarah kemerdekaan Indonesia menjadikan Kota Surabaya menjadi kota yang sangat sering dikunjungi baik dalam kegiatan pariwisata, bisnis, dan juga pendidikan. Keterlibatan industri pariwisata dan pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa ada kerjasama yang tulus antara semua pihak yang terlibat. Berdasarkan sumber-sumber sekunder yang dipaparkan di atas, penulis mempersempit fokus penelitian ini untuk mengkaji mengenai “Implementasi Kebijakan *Surabaya Cross Culture International* sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata di Kota Surabaya”.

Penelitian ini mengkaji tentang peran dan efektivitas tata kelola aktor kolaboratif dalam keberhasilan pemerintah provinsi Surabaya dalam menerapkan kebijakan Lintas Budaya Internasional yang bertujuan untuk membina industri pariwisata kota. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan pertama kali oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Winarno (2007). Menurut Van Meter, ada enam faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan dijalankan yaitu: (1) Asal usul dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya kebijakan; (3) Sifat unik organisasi pelaksana kebijakan; (4) Dialog antar organisasi; (5) Mentalitas para pelaksana; (6) Kerangka sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Ide-ide ini bersatu untuk membentuk struktur teoretis yang memandu kemajuan studi ini, yang dimulai dengan pemeriksaan tentang bagaimana kebijakan *Surabaya Cross Culture Internasional* telah dipraktikkan berdasarkan teori Van Meter Van Horn dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kerjasama antara berbagai aktor yang terlibat dalam pemerintahan.

Tinjauan Kepustakaan

Peneliti menggunakan tinjauan pustaka ini sebagai panduan untuk menjaga pekerjaan mereka tetap fokus dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembaca untuk mendapatkan manfaat darinya. Studi pertama adalah strategi untuk pertumbuhan karnaval mode Jember dan ditulis oleh Permata (2018) dengan judul “Strategi Pengembangan Manajemen Jember Fashion Carnaval”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan yang dilakukan oleh *Jember Fashion Carnaval* (JFC) dalam mengembangkan strategi menarik perhatian masyarakat agar dapat tergabung dan mendorong daya tarik wisata dalam jangka waktu yang panjang. Metode penelitian menggunakan kualitatif didukung dengan data kuantitatif, yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa JFC mampu menjalankan visi dan misi dengan baik. Namun, perlu adanya inovasi- inovasi baru dengan menyusun strategi umum seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk.

Penelitian kedua berjudul “*Daya Tarik Wisata Budaya Festival Cian Cui di Kota Selat Panjang Provinsi Riau*” oleh Nuansya (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari seberapa menarik festival Cian Cui bagi pengunjung, bagaimana perasaan penduduk setempat tentang festival tersebut, dan bagaimana Kota Selat Panjang dapat lebih mempromosikan festival tersebut sebagai daya tarik wisata. Dalam hal ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Festival Budaya Cian Cui bukanlah sebuah perayaan keagamaan melainkan sebuah ritual yang dibangun secara sosial yang terbuka untuk semua anggota masyarakat, dan bahwa keunikan, keindahan, dan nilai-nilai yang dialami pada festival tersebut berasal dari beragam atraksinya. Masyarakat memiliki kesan positif terhadap festival Cian Cui karena banyak manfaat yang diberikan, seperti acara promosi pariwisata, perdagangan selama acara, dan yang paling penting, saat budaya Melayu dan Cina dapat bersatu dengan yang lain. Target pemerintah dari 15.000-20.000 pengunjung menyebabkan perluasan jalan menuju festival, serta peningkatan fasilitas lain dan festival budaya Cian Cui itu sendiri.

Penelitian ketiga berjudul “*Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal*” oleh Sugiyarto & Amaruli (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji industri pariwisata berbasis budaya dan pengetahuan tradisional di Jawa Tengah. Metode yang digunakan yaitu kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi. Temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk analisis SWOT antara lain saran untuk: (1) meningkatkan pemasaran destinasi wisata budaya dengan bekerja sama dengan pihak terkait; (2) meningkatkan potensi budaya lokal melalui kerjasama dengan pemerintah dan swasta; (3) meningkatkan potensi budaya lokal dengan bekerja sama dengan sektor publik dan swasta; (4) membentengi sentra kerajinan budaya dan peran masyarakat lokal dan kelompok pariwisata; (5) Membangun infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung wisata budaya; (6) Meningkatkan kolaborasi antar-daerah dan antar-pemerintah dalam pariwisata budaya, khususnya di sepanjang pantai utara Lingkaran Arktik; (7) Memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri pariwisata, khususnya yang bergerak di bidang pariwisata budaya; (8) Kekhasan wisata budaya harus dilestarikan sesuai dengan kearifan lokal dan didukung oleh barang-barang kerajinan lokal; dan (9) Pencegahan pengamatan budaya pesisir. Sedangkan strategi pengemasan budaya lokal dilakukan dalam bentuk parade festival budaya seperti Central Java Fair.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan lainnya adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Surabaya Cross Culture International*, yang didirikan untuk meningkatkan pariwisata di kota dengan meminjam perspektif teoritik Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif (Pujileksono, 2016). Penelitian kualitatif memerlukan pendekatan sistematis untuk pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, dan sintesis naratif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya dimulai pada bulan September-Oktober 2019. Wawancara dan studi kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Dalam investigasi ini, wawancara dilakukan dengan sumber-sumber berikut:

- a. Staff bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- b. Ketua DPRD Kota Surabaya Periode 2014–2019
- c. Perwakilan Ning Kota Surabaya tahun 2019

Dalam tinjauan pustaka, peneliti mencari informasi yang relevan dalam materi yang diterbitkan seperti buku, artikel, laporan, jurnal, dan artikel majalah. Artikel-artikel dari berbagai sumber, termasuk internet, serta catatan penting tentang objek yang diminati yaitu *Surabaya Cross Culture* di Kota Surabaya dikumpulkan untuk penelitian ini. Sebagai dasar untuk mengumpulkan data sekunder dan studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi *Surabaya Cross Culture International*

Proses implementasi kebijakan ke dalam tindakan melibatkan kerja menuju serangkaian hasil yang ditentukan dengan menggunakan metode dan langkah yang telah ditentukan sebelumnya (Taufiqurokhman, 2015). Kebijakan publik adalah produk dari apa yang telah terjadi pada tahap-tahap awal proses kebijakan yang kemudian harus dilaksanakan (Hill & Hupe, 2002). Menurut M. Joko Susilo (dalam Ula & Nawangsari, 2017), yang dimaksud dengan "implementasi" adalah proses mempraktikkan suatu gagasan, konsep, kebijakan, atau inovasi agar berdampak pada penerimanya, baik berupa perubahan pemahaman, perilaku, maupun keyakinan dan nilai-nilai. Berdasarkan definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah proses mewujudkan rencana ke dalam tindakan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

Agar berhasil dalam usaha ini, seseorang harus memiliki semacam indikator atau variabel untuk membantu mereka mencapai tujuan. Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2018) menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain:

1. Seseorang harus memiliki tujuan dan tolok ukur yang jelas untuk suatu kebijakan untuk mengevaluasi keberhasilannya.
2. Pendanaan atau insentif yang dapat mendorong pelaksanaan yang efisien.
3. Standar kolaborasi antara bisnis yang berbeda. Untuk memastikan bahwa proses implementasi dilakukan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditentukan, seringkali diperlukan prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kontrol dari atas.
4. Kompetensi dan ukuran badan pelaksana, tingkat kendali hierarkis pada unit pelaksana terendah selama pelaksanaan, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan hubungan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan merupakan karakteristik dari badan dan organisasi pelaksana.
5. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (ada atau tidaknya sumber daya ekonomi yang memadai, bagaimana publik bereaksi terhadap kebijakan tersebut, apakah elit mendukung implementasinya atau tidak, dan sebagainya).
6. Mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana atau akan bereaksi (termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang isi dan tujuan kebijakan, sikap terhadap kebijakan, dan intensitas sikap).

Melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menerapkan kebijakan maka untuk itu peneliti akan menguraikannya. Secara lebih spesifik akan dijelaskan dengan

menggunakan indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn:

1. Tujuan Kebijakan dan Standar yang Jelas

Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan:

- a. Menjalin Hubungan secara Aktif dengan Daerah-Daerah di Indonesia dan Luar Negeri;

Hal tersebut tercermin dari paparan narasumber, yaitu staff kebudayaan Disbudpar, yaitu:

“Kegiatan ini istilahnya untuk mempererat hubungan antara Kota Surabaya dengan sister city, kalau dulu pesertanya kebanyakan dengan kota kerja sama sister city saat ini untuk yang peserta dalam itu (dalam negeri) gak hanya dari luar negeri aja, dari dalam negeri juga ada”.

Poin pertama ini sangat memperjelas bahwa media yang memfasilitasi komunikasi antara Surabaya dengan masyarakat dan organisasi baik di dalam maupun di luar daerah sangat diperlukan untuk keberhasilan kegiatan *Surabaya Cross Culture International*. Secara khusus, membangun hubungan yang harmonis dengan banyak kota kembar di berbagai negara di seluruh dunia.

- b. Ajang Pertukaran Budaya dengan Memperkenalkan Daerah-Daerah di Indonesia kepada Dunia Luar Maupun Sebaliknya melalui Pertunjukan Seni Budaya;

Sebagai acara multi seniman, *Surabaya Cross Culture International* mendorong komunikasi dan pemahaman antara seniman dan orang-orang yang datang untuk melihat atau mengamati mereka. Berikut adalah tanggapan atas pertanyaan tentang pemikiran dan niat seniman internasional untuk berpartisipasi dalam festival antar budaya ini:

“Antusias, karena memang mereka ingin memperkenalkan budaya asli mereka ke kita, dan sebaliknya kita juga ingin memperkenalkan budaya kita ke mereka, dan kita juga menganggap ini ajang silaturahmi antar seniman. Di sana juga ada tampilan-tampilan di taman kan, ada di Taman Bungkul, ada di mal-mal juga, itu karena memang kita sengaja buat tujuannya menghibur masyarakat, bahwasannya ini loh Surabaya bisa menjadi kota yang bisa menyelenggarakan tampilan kesenian dari berbagi macam elemen negara, jadi masyarakat bisa tahu, bahwasannya oh tarian dari Mexico itu kayak gini ya, kayak di Royal (plaza) itu antusiasme masyarakat sangat luar biasa”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa motivasi perjalanan para delegasi tidak terbatas untuk menghadiri undangan Surabaya, melainkan juga berasal dari keinginan masing-masing negara untuk berbagi contoh budaya uniknya dengan dunia. Bahkan, seniman tidak hanya berbagi informasi tentang seni dan budaya negara dan wilayah asal mereka satu sama lain selama acara yang dijadwalkan, tetapi juga selama acara informal di luar jadwal.

Penampilan mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan masyarakat tentang budaya lain. Kerumunan tampak menikmati pertunjukan para seniman. Warga Surabaya Indonesia yang menjadi tuan rumah acara *Surabaya Cross Culture International* menunjukkan apresiasinya dengan mengemas tempat-tempat

acara para delegasi berlangsung.

- c. Mempromosikan Surabaya sebagai lokasi yang kaya akan nilai budaya, sejarah, dan seni serta makanan khas daerah Kota Surabaya seperti yang disampaikan oleh staf Disbudpar Kota Surabaya, inisiatif berikut:

“Di acara ini kami ajak mereka ke beberapa tempat bersejarah di Kota Surabaya seperti Museum House of Sampoerna, Museum Tugu Pahlawan Surabaya, Museum De Javasche Bank, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah memperkenalkan bahwasanya Surabaya merupakan kota pahlawan. Selain itu, kami juga adakan pagelaran tari khusus di Balai Kota Surabaya, sembari menari kita juga menyajikan beberapa menu khas kota Surabaya seperti Rujak Cingur, Lontong Balap, dan Pecel Semanggi agar mereka bisa merasakannya”

- d. Melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional Kota Surabaya dan kota lainnya di Indonesia serta berbagai kesenian dari mancanegara:

Seniman lokal dari Surabaya dan tempat lain di Indonesia, serta seniman internasional dari seluruh dunia, diberikan platform untuk memamerkan karya mereka di festival tahunan *Surabaya Cross Culture International*. Penari remo yang akan tampil di berbagai acara telah berlatih dan berlatih secara rutin untuk memastikan keutuhan penampilan mereka. Oleh karena itu, Sanggar Tari Remo selalu ramai dengan aktivitas. Mirip dengan apa yang dilakukan penari dari kota-kota lain di Indonesia dan negara lain.

2. Sumber Daya

Jumlah dana yang cukup sangat penting untuk peluncuran yang efektif dari *Surabaya Cross Culture International*. Sumber daya manusia, sumber daya moneter, serta prasarana dan sarana merupakan contoh sumber daya yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan *Surabaya Cross Culture International*. Mempekerjakan sumber daya manusia sebagai penggerak, pemikir, perencana, dan penyelenggara acara sangat penting. Sementara itu, sumber daya keuangan membantu memastikan bahwa acara dapat berlangsung tanpa hambatan, seperti halnya sumber daya untuk infrastruktur dan fasilitas.

Dari segi sumber daya manusia, keuangan, dan fisik, Pemerintah Kota Surabaya memiliki lebih dari cukup untuk menggelar *Surabaya Cross Culture International*. Di Surabaya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara pribadi mengawasi pelaksanaan kegiatan Lintas Budaya Internasional. *Surabaya Cross Culture International* bekerja sama dengan berbagai departemen dan organisasi pemerintah, termasuk Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Humas.

Pemerintah Kota Surabaya sangat mendukung penuh rencana *Surabaya Cross Culture International* ini. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah dimanfaatkan untuk pelaksanaan acara ini. Tidak ada uang sponsor yang digunakan atau diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya. Fasilitas seperti transportasi, kostum peserta, penginapan, makanan, dan perlengkapan semuanya digunakan untuk mensukseskan *Surabaya Cross Culture International*.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu kebijakan atau program harus memiliki sifat yang kokoh dan mematuhi setiap sanksi hukum yang relevan (Moran et al., 2006). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai penyelenggara utama kegiatan festival lintas budaya *Surabaya Cross Culture International*, mencontohkan dedikasi kota untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata melalui penyediaan layanan prima melalui mekanisme dan peraturan yang telah dibuat untuk memastikan kelancaran festival. Ini termasuk hal-hal seperti Prosedur Operasi Standar dan ketentuan teknis untuk kegiatan itu sendiri.

Penandatanganan kerjasama dengan CIOFF (*International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts*) dalam festival internasional ini berbicara banyak tentang sifat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Di bawah naungan UNESCO, CIOFF adalah organisasi budaya global yang menyambut semua tingkat partisipasi dari anggotanya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya mengandalkan CIOFF untuk menyampaikan informasi tentang peserta internasional seri festival internasional kepada publik.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Kondisi organisasi yang baik membutuhkan komunikasi internal dan eksternal yang efisien. Karena ketika dua orang mampu berkomunikasi secara efektif, mereka dapat sampai pada kesimpulan yang sama. Dalam situasi ini, atasanlah yang melakukan komunikasi; khususnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dengan dukungan seluruh instansi Pemerintah Kota Surabaya. Kolaborasi agensi yang baik dimungkinkan dengan saluran komunikasi yang mapan. Ini berarti bahwa setiap orang yang terlibat dalam program perlu menyadari standar dan tujuan. Kelompok-kelompok yang bertanggung jawab untuk mengadakan Festival Internasional Lintas Budaya Surabaya terus berhubungan satu sama lain, seperti yang ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan mereka.

Surabaya Cross Culture International mengandalkan koordinasi, sinkronisasi, dan pertemuan rutin antara berbagai instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ada banyak bolak-balik antara semua pihak yang terlibat sebagai festival internasional sedang diselenggarakan. Kerjasama dengan CIOFF melalui Internet untuk Pertukaran Informasi (*International Council of Organizations for Folklore Festivals and Folk Arts*). Keberhasilan festival tahunan Kota Surabaya tergantung pada kemampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk tetap berhubungan dengan peserta lokal dan internasional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya mengumpulkan informasi tentang alergi makanan peserta untuk menunjukkan bahwa pengunjung yang memiliki kepekaan terhadap makanan tetap dapat menikmati masakan kota.

5. Sikap Para Pelaksana

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya telah menunjukkan keinginannya untuk merangkul dan mendukung visi Walikota Tri Rismaharini untuk *Surabaya Cross Culture International*. CEO *Surabaya Cross Culture International* adalah kepala departemen budaya dan pariwisata kota yang dipilih langsung oleh walikota. Semua dinas kota akan siap membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

menjalankan rencana yang telah mereka susun. Organisasi yang berpartisipasi memberikan banyak energi untuk merencanakan acara tahunan yang besar ini. Semangat ini terlihat dari kesiapsiagaan mengelola acara dengan rapi dan teratur. Merencanakan sebuah acara setidaknya selama enam bulan dengan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakannya adalah tanda kesiapan lainnya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Surabaya adalah tempat yang aman dan stabil untuk kehidupan politik. Selain itu, hampir tidak ada perselisihan antara berbagai otoritas. Sebab, PDI-P juga memasok ketua DPRD dan PDI-Walikota Surabaya memegang kekuasaan eksekutif (PDIP). Selain itu, partai-partai yang berafiliasi dengan koalisi pemerintah saat ini memegang mayoritas kursi di parlemen. Hal ini memudahkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk mengimplementasikan agendanya dan menjalankan keputusannya. Keberadaan *Surabaya Cross Culture International* mendapat dukungan luas baik dari eksekutif maupun legislatif. Bahkan dalam hal perumusan anggaran, Pemkot Surabaya harus menyampaikan kasusnya kepada DPRD Kota Surabaya, termasuk sejarah, signifikansi, dan hasil yang diharapkan dari acara tersebut. Anggaran untuk *Surabaya Cross Culture International* dengan cepat disetujui oleh Dewan Kota Surabaya, tetapi cukup besar, mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD Kota Surabaya tahun 2014-2019, beliau mengatakan:

"Apapun gagasan yang dikonsep oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dirasa itu baik dan membawa manfaat bagi kemajuan pariwisata tentunya saya dukung"

Hal ini memastikan bahwa *Surabaya Cross Culture International* bebas dari segala intervensi politik, baik berupa campur tangan dari lembaga-lembaga daerah maupun gangguan perijinan acara.

Surabaya telah memantapkan dirinya secara ekonomi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan. Lebih dari itu, Surabaya juga merupakan pusat komersial yang ramai. Surabaya berfungsi seperti toko serba ada yang menampung setiap aktivitas yang dapat dibayangkan dan menyediakan setiap layanan tambahan yang diperlukan. Kota Surabaya sangat bergantung pada perdagangan (Humas Surabaya, 2018). Kota Surabaya, Jawa Timur, memiliki standar hidup dan output ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di kawasan ini, tetapi faktor-faktor itu dapat menurunkan angka-angka tersebut. Menurut BPS Kota Surabaya dan Bapekko (Badan Perencanaan Kota Surabaya), PDRB ADHB (Produk Domestik Bruto Harga Berlaku) kota pada tahun 2017 adalah Rp. 503.824.868,16 juta, naik dari Rp. 451.486.791,00 juta pada tahun 2016. Pada tahun 2017, PDRB (Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan) Kota Surabaya sebesar Rp 364.619.859,76 juta. Pada tahun 2017, perekonomian Surabaya tumbuh sebesar 6,10%, naik 0,1% dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,00 %.

Pendapatan daerah tahunan Pemerintah Kota Surabaya sangat bergantung pada ekonomi yang sehat dan tumbuh. Ketika perekonomian nasional membaik, demikian pula pendapatan daerah-daerah penyusunnya. Penerimaan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp 8.723.701.263.734 (8,7 triliun), sesuai Peraturan Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar

Rp8.079.142.194.268. (8,07 triliun) Anggaran Perubahan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2018.

Ketika suatu daerah memiliki anggaran pendapatan yang cukup besar, berbagai program dapat dilaksanakan dengan mudah sesuai dengan cetak biru yang telah ditetapkan. Investasi ini berfokus pada salah satu program tersebut yaitu *Surabaya Cross Culture International* yang didukung oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memberikan secara spesifik kepada peneliti tentang jumlah uang yang dialokasikan untuk menjadi tuan rumah acara tersebut, hanya saja “dalam ratusan juta rupiah”. Mengingat pendapatan yang cukup besar yang diterima Kota Surabaya, pengeluaran dana yang begitu besar bukanlah masalah yang menantang dan rumit bagi kota terbesar kedua di Indonesia ini.

Lebih jauh, Surabaya adalah kota yang heterogen secara sosial dengan orang-orang dari berbagai ras, agama, dan budaya yang hidup berdampingan. Beberapa contoh kabupaten tersebut adalah Pecinan di Tambak Bayan, Kampung Arab di Kecamatan Wisata Religi Sunan Ampel, dan Kampung Madura di Kenjeran. Karena mereka sangat berbeda, mereka lebih mampu menerima, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Menurut Soedarso et al., (2013), relasi sosial antar masyarakat di Kota Surabaya telah terjalin baik. Relasi sosial tersebut, misalnya, ditandai dengan tidak ada lagi yang membedakan tetangga secara sosial atas dasar ras, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Sebagian alasannya adalah karena orang telah belajar dari waktu ke waktu bahwa perbedaan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan sosial.

Pemkot Surabaya berupaya mengakomodir keragaman tersebut melalui taman kota, sentra kuliner, sentra UMKM, kegiatan senam pagi untuk lansia, CFD (Car Free Day) yang diadakan di Taman Bungkul setiap hari Minggu, dan organisasi kepemudaan seperti FAS (Surabaya Children's Day), serta Forum yang menjangkau anak-anak di kota. Selain itu, hari lahir Surabaya sebenarnya dirayakan dengan festival besar setiap tahun. Parade Busana Surabaya, Aerial Rally Drone Competition 2019, Jambore Sepeda Tua Nasional Tahunan ke-7, Lomba Senam Terapi Sehat Cakra Wiweka, dan Lomba Olahraga Tradisional hanyalah beberapa contohnya.

Selain HJKS (HUT Surabaya), Pemkot Surabaya juga kerap menggelar acara lain seperti *Mlaku-Mlaku Nang Tunjungan*, Pasar Lukisan Indonesia, Parade Juang, dan Lintas Budaya Internasional Surabaya. Pemkot Surabaya selalu menghadirkan acara-acara yang seru, modern, dan ramai karena selalu terdepan. Banyak orang menggunakannya sebagai saluran untuk hasrat mereka, cara untuk menemukan restoran baru dan menarik, cara untuk mendokumentasikan perjalanan mereka, cara untuk mendokumentasikan sejarah, cara untuk mengambil gambar, dan bahkan sebagai kendaraan untuk pertumbuhan pribadi. Orang-orang dari seluruh dunia berduyun-duyun ke Surabaya setiap tahun untuk festival *Surabaya Cross Culture International*. Ratusan seniman dari seluruh dunia dan seluruh negeri berkumpul di Jalan Tunjungan mengenakan pakaian tradisional terbaik mereka untuk festival tahunan ini.

Acara tahun ini menarik sekitar 300 peserta dari seluruh dunia, termasuk China, Korea Selatan, Uzbekistan, Jerman, Polandia, Rumania, Rusia, Meksiko, dan Selandia Baru. Penampil dari berbagai kalangan memadati acara tersebut dari kota-kota seperti Surabaya, Bone, Singkawang, dan Banjarmasin di Indonesia. Selama lima hari berturut-turut, Surabaya menyelenggarakan berbagai acara menarik, termasuk parade, tur situs budaya penting, inisiatif penanaman pohon, dan barbekyu di Pantai Rekreasi Kenjeran.

Kebijakan *Surabaya Cross Culture International* telah berlaku selama 15 tahun. Kebijakan ini membawa dampak, baik bagi Pemerintah Kota Surabaya maupun masyarakat Surabaya itu sendiri. Keseluruhan kebijakan *Surabaya Cross Culture International* berhasil dan membuahkan hasil yang diinginkan karena didasarkan pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. *Pertama*, berkaitan dengan tujuan dan kriteria pembuatan kebijakan (Torjman, 2005). Penting untuk mempromosikan Surabaya ke seluruh dunia karena nilai budaya, sejarah, dan makanannya yang khas, tetapi yang kedua adalah membangun hubungan kerjasama yang aktif antara daerah di Indonesia dan internasional, terlibat dalam pertukaran budaya, dan melestarikan dan mengembangkan seni tradisional. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuansya (2017) adanya festival budaya dapat memperkenalkan ragam seni budaya yang dimiliki Kabupaten Meranti, selanjutnya dapat membangkitkan kecintaan dan kebanggaan terhadap festival budaya Cian Cui. Bahwa dengan adanya festival kebudayaan dapat menjadikan sarana untuk menunjukkan kebudayaan yang dimiliki suatu daerah ke luar daerah atau luar negeri.

Kedua, Pemerintah Kota Surabaya memiliki sumber daya yang mampu, siap, dan memadai dalam menyelenggarakan *Surabaya Cross Culture International* dari segi tenaga (manusia), sumber daya keuangan (anggaran), serta infrastruktur dan sarana pendukung. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Permata (2018), bahwa pelaksanaan JFC merupakan usaha besar bagi Kabupaten Jember dan oleh karena itu akan membutuhkan sumber daya keuangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan festival kebudayaan tidak sedikit biaya yang perlu dikeluarkan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya juga berkolaborasi dengan pihak *stakeholder* yang lainnya. Pihak swasta salah satunya, kerjasama maupun negosiasi dilakukan Pemerintah Kota Surabaya seperti kepada Ciputra dan beberapa pemilik mal di Surabaya yang dirasa sebagai lokasi strategis yang tepat, diantaranya: (1) Ciputra/G-Walk yang bertugas menyediakan panggung untuk penampilan peserta, menyediakan ruang ganti, menyediakan snack dan air minum bagi seluruh peserta, menyediakan *sound system*; (2) Ciputra World yang bertugas menyediakan kursi dan *sound system* menyediakan panggung untuk tempat tampilan peserta, menyediakan ruang ganti, menyediakan *snack* dan air minum bagi seluruh peserta; (3) Royal Plaza yang bertugas menyediakan tempat tampilan peserta, menyediakan ruang ganti, menyediakan kursi dan *sound system* menyediakan snack dan air minum bagi seluruh peserta.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, sesuai dengan analisis implementasi kebijakan yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan festival lintas budaya *Surabaya Cross Culture International* berhasil meskipun masih terdapat kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan. Seperti kendala teknis dalam mempersiapkan kostum bagi para peserta. Beragamnya budaya yang dibawa oleh masing-masing peserta mengakibatkan sulitnya mempersiapkan kostum sesuai dengan budaya setiap peserta.

Selain kendala kostum, kendala bahasa juga terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan festival lintas budaya tersebut, karena tidak semua peserta luar negeri menguasai Bahasa Inggris. Selanjutnya, kendala waktu. Peserta dari luar negeri yang mayoritas memiliki kedisiplinan tinggi akhirnya menanggung keterlambatan dari peserta-peserta dalam negeri serta adanya kendala kemacetan lalu lintas. Walaupun kendala-kendala tersebut terjadi selama proses kegiatan, namun tak membawa kerugian yang berarti karena adanya komunikasi dan kolaborasi yang terjalin antar

aktor *governance* dengan sangat baik serta dukungan penuh dari masyarakat yang mampu membawa kepada keberhasilan kegiatan festival lintas budaya tersebut.

Kesimpulan

Sudah 15 tahun sejak Surabaya pertama kali menerapkan kebijakan Lintas Budaya Internasional. Pemerintah kota Surabaya dan warga Surabaya telah merasakan manfaat dari kebijakan ini. Menurut model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, strategi menyeluruh *Surabaya Cross Culture International* berhasil dan memberikan hasil yang diinginkan. Meskipun masih terdapat kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan. Seperti kendala teknis dalam mempersiapkan kostum bagi para peserta. Beragamnya budaya yang dibawa oleh masing-masing peserta mengakibatkan sulitnya mempersiapkan kostum sesuai dengan budaya setiap peserta.

Selain kendala kostum, kendala bahasa juga terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan festival lintas budaya tersebut, karena tidak semua peserta luar negeri menguasai Bahasa Inggris. Selanjutnya, kendala waktu. Peserta dari luar negeri yang mayoritas memiliki kedisiplinan tinggi akhirnya menanggung keterlambatan dari peserta-peserta dalam negeri serta adanya kendala kemacetan lalu lintas. Walaupun kendala-kendala tersebut terjadi selama proses kegiatan, namun tak membawa kerugian yang berarti karena adanya komunikasi dan kolaborasi yang terjalin antar aktor *governance* dengan sangat baik serta dukungan penuh dari masyarakat yang mampu membawa kepada keberhasilan kegiatan festival lintas budaya tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik (2 ed)*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Guo, Y., Jiang, J., & Li, S. (2019). A Sustainable Tourism Policy Research Review. *Sustainability (Switzerland)*, 11(11), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su11113187>
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. Sage Publications.
- Juliawati, N. P. E. (2012). Representasi Budaya Lokal Dalam Kegiatan Denpasar Festival Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Kajian Budaya Universitas Udayana*, 1(1), 28–40.
- Kosnan, S. S. A., Ismail, N. W., & Kaliappan, S. R. (2013). Determinants of International Tourism in Malaysia: Evidence from Gravity Model. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 47(1), 131–138.
- Mbaiwa, J. E., Motsholapheko, M. R., Kgathi, D. L., & Monnamorwa, S. (2018). Tourism and Energy Use in Lodges and Camps in the Okavango Delta, Botswana. *International Journal of Tourism Policy*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.1504/IJTP.2018.090318>
- Moran, M., Rein, M., & Goodin, R. E. (2006). *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press.
- Nuansya, A. (2017). Daya Tarik Wisata Budaya Festival Cian Cui Di Kota Selat Panjang Provinsi Riau. *Jom Fisip*, 4(2).
- Pemerintah Kota Surabaya. (2018a). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018*. Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2018b). *Sosial Ekonomi*. Pemerintah Kota Surabaya. <https://surabaya.go.id/id/page/0/8177/sosial-ekonomi>

- Pemerintah Kota Surabaya. (2019a). *Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 9 tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*. Pemerintah Kota Surabaya.
https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf
- Pemerintah Kota Surabaya. (2019b). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019*. Pemerintah Kota Surabaya.
https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf
- Permata, V. W. (2018). Strategi Pengembangan Manajemen Jember Fashion Carnaval. *Anterior Jurnal*, 17(2), 69–78.
- Pujileksono. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (2 ed)*. Malang: Intrans Publishing.
- Singgalen, Y. A., Wiloso, P. G., & Sasongko, G. (2017). Evaluation of the Implementation of Tourism Policy. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 21(1), 82.
<https://doi.org/10.22146/jkap.16751>
- Soedarso, S., Nurif, M., Sutikno, S., & Windiani, W. (2013). Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(1), 62–75.
<https://doi.org/10.12962/j24433527.v6i1.611>
- Sugiyarto, & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Pendahuluan Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Budaya Lokal Metode. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 45–52.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Taufiqurokhman. (2015). Implementasi Kebijakanpeningkatan Indeks Pembangunan Manusiadi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. *Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Padjadjaran*.
- Torjman, S. (2005). *What is Policy?* (Issue September). The Caledon Institute of Social Policy.
- Ula, S. M., & Nawangsari, E. R. (2017). Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer Based Test, CBT) Di SMP Negeri 1 Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance*, 7(1), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdg.v7i1.1193>
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.